

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya elite Projo dalam mempertahankan akses terhadap sumber daya kekuasaan pasca-Pilpres 2024 pada hakikatnya berpusat pada satu kalkulasi politik utama, yaitu konversi modal elektoral demi merapat kepada Prabowo Subianto sebagai patron baru di tengah transisi kepemimpinan nasional. Perilaku politik Projo dalam masa transisi ini digerakkan oleh rasionalitas elite yang berusaha mengamankan posisi dalam struktur kekuasaan baru, namun pada saat yang sama dibatasi oleh batas-batas struktural yang tidak dapat ditembus hanya melalui jasa kemenangan pemilu semata.

Proses konversi modal politik ini diawali dari strategi elite Projo yang mentransformasikan mobilisasi massa dan kontribusi kolektif dalam Musyawarah Rakyat (Musra) menjadi instrumen tawar politik di hadapan Prabowo Subianto. Kemenangan elektoral yang berhasil diraih kemudian dikonversi menjadi akses jabatan formal di pemerintahan, meskipun distribusi manfaat tersebut tidak mengalir ke basis relawan akar rumput melainkan terkonsentrasi hanya pada segelintir elite inti organisasi. Namun demikian, langkah merapat ke pusat kekuasaan baru ini menciptakan dilema loyalitas ganda yang mendalam bagi Projo. Sebagai agen politik, Projo terjebak di antara kewajiban moral menjaga keterikatan historis dengan Joko Widodo sebagai patron lama dan tuntutan kepatuhan pragmatis kepada Prabowo Subianto sebagai patron baru. Ambiguitas loyalitas ini menyebabkan posisi Projo dipersepsikan sebagai beban reputasional di mata principal baru, yang pada puncaknya memicu tindakan korektif berupa pencopotan Budi Arie Setiadi dari Kabinet Merah Putih sebagai bentuk penegasan kendali kekuasaan.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa akses kekuasaan yang diperoleh elite Projo bersifat kontingen, tidak mandiri, dan tidak memiliki jaminan institusional yang stabil. Dalam struktur politik Indonesia kontemporer, lingkaran inti (*inner core*) kekuasaan dikuasai secara ketat oleh elite yang memiliki basis institusional otonom melalui partai politik, militer, dan kekuatan

ekonomi, di mana Projo tidak memiliki jangkar pada salah satu pilar tersebut. Penolakan dari kader struktural Partai Gerindra terhadap integrasi elite Projo serta pencopotan jabatan menteri secara sepihak mempertegas bahwa model patronase personal yang menjadi fondasi Projo sejak awal secara struktural tidak kompatibel dengan syarat masuk ke lingkaran inti kekuasaan. Dengan demikian, upaya elite Projo berhasil memberikan akses kekuasaan yang bersifat sementara, tetapi secara struktural gagal mengamankannya secara berkelanjutan.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Bagi organisasi Projo maupun organisasi relawan sejenis, para pengambil keputusan di tingkat pusat harus segera menyadari keterbatasan struktural dari model gerakan yang hanya bergantung pada patronase personalistik dan figur tunggal. Jika ingin mempertahankan eksistensi organisasi dalam jangka panjang menuju kontestasi politik di masa depan, Projo wajib melakukan pelebagaan organisasi secara mandiri dan otonom. Langkah ini dapat ditempuh dengan membangun basis ekonomi organisasi yang mandiri agar tidak bergantung pada distribusi logistik dari negara atau patron, serta mulai merumuskan agenda perjuangan yang berbasis pada kepentingan programatik masyarakat luas. Projo harus bertransformasi dari sekadar mesin stempel elektoral menjadi institusi yang memiliki nilai tawar ideologis yang jelas.

Selain bagi elite pusat, saran praktis juga ditujukan bagi para kader dan aktivis di tingkat akar rumput. Para relawan di tingkat daerah perlu meningkatkan posisi tawar mereka di dalam internal organisasi dengan cara menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi dalam setiap proses pengambilan keputusan strategis. Kader di tingkat bawah tidak boleh membiarkan arah dukungan politik organisasi ditentukan secara sepihak oleh elite pusat tanpa melalui mekanisme agregasi preferensi yang inklusif dari bawah. Hal ini sangat krusial untuk dilakukan guna mencegah organisasi sekadar dijadikan sebagai alat

komodifikasi politik oleh segelintir pengurus inti demi keuntungan personal.

5.2.2 Saran Teoretis

Penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup yang berfokus pada dinamika aktor relawan di tingkat nasional dan hubungannya dengan elite kekuasaan pusat dalam masa transisi pemerintahan pasca-Pilpres 2024. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada kajian sosiologi politik dan kelompok kepentingan, disarankan untuk memperluas lokus penelitian melalui analisis komparatif mengenai perilaku kelompok relawan di tingkat lokal, khususnya dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Studi komparatif di tingkat lokal akan memberikan gambaran yang lebih kaya mengenai bagaimana pola konversi modal elektoral dan konsentrasi manfaat ini beroperasi dalam skala desentralisasi ketika berhadapan dengan kekuatan dinasti politik daerah maupun pengusaha lokal.

Selanjutnya, peneliti berikutnya disarankan mengkaji dari sudut pandang prinsipal seperti internal Partai Gerindra untuk menggali logika institusional partai penguasa dalam mengendalikan masuknya kelompok relawan ke struktur kekuasaan formal. Selain itu, aspek redefinisi identitas Projo pasca-Kongres menarik diteliti untuk melihat dampaknya terhadap loyalitas dan potensi fragmentasi kader di akar rumput. Kedua fokus ini penting guna memperluas pemahaman tentang batas antara masyarakat sipil dan kekuasaan negara, sekaligus mempertegas keterbatasan organisasi relawan berbasis patronase personal.